

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Pendidikan juga memegang peran penting dalam pembangunan, sehingga kemajuan pendidikan sangat dibutuhkan bagi suatu bangsa yang ingin menuju kemajuan. Untuk kemajuan pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dari berbagai elemen bangsa terutama pemerintah. Dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, dan untuk program wajib belajar pendidikan dasar, pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pendanaanya. Selain itu, perkembangan pendanaan pemerintah melalui APBN mengalami perkembangan, pengurangan subsidi untuk BBM mempengaruhi besaran subsidi untuk bidang lainnya, begitu juga dengan pendidikan, salah satu hasilnya yaitu adanya pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pendidikan. (Mulyasa, 2006).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1998-2003. Dengan program dana BOS, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin, karena pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. (Zainuddin, 2008)

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, karena itu pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Kenyataan ini merupakan progresifitas dan komitmen dalam hal memajukan dunia pendidikan. Sejak tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan kemudian dikuatkan dengan diterbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Hasil dari program 9 tahun dianggap telah berhasil dituntaskan, hal tersebut tercermin dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mencapai target. Konsekuensi selanjutnya yang timbul dari keberhasilan program tersebut adalah meningkatnya jumlah lulusan SMP yang harus ditampung oleh Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun yang terjadi pada saat ini, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dimana angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih tinggi dibandingkan dengan SMP. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan SMP lebih tinggi dibandingkan SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat. (Kemdiknas, 2010).

Tingginya angka partisipasi terhadap sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Hal tersebut terbukti dari 35,9% anak dipertanian dan dipedesaan berumur antara 7 hingga 17 tahun yang tidak sekolah akibat tidak adanya biaya.

Alasan tersebut adalah alasan yang paling dominan yang diberikan, meskipun faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan anak putus sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA. Untuk itu, pemerintah telah membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 (Lampiran 1), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 (Lampiran 2), dan sekolah diharapkan mampu melakukan pelaksanaan dana BOS berdasarkan JUKNIS yang telah dirancang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari segala tindakan kecurangan yang mungkin terjadi.

Adanya kebijakan dana BOS bukan berarti selesainya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan penggunaan, dan ketidakefektifan pelaksanaan dana BOS. Pemerintah telah berusaha memfasilitasi, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh dalam penyelewengan dan ketidakefektifan pelaksanaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan dana BOS. (Mulyasa, 2006).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dana BOS merupakan salah satu wadah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan pemeriksaan BPK, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana BOS. Untuk itu, maka salah satu cara yang

dilakukan oleh pemerintah adalah melalui perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program dana operasional sekolah, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan dana BOS, sehingga dana yang didapatkan nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang ada. Dan terdapat juga beberapa kepala sekolah dan bendahara terlihat panik dan kasak-kusuk saat tim BPK meminta laporan jawaban dana BOS. Hal ini tentunya terjadi karena sekolah yang masih belum melakukan pengelolaan dana BOS sebagaimana mestinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan terhadap ratusan Kepala Sekolah di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi tentunya pelaksanaan dana BOS di Sumatera Barat masih dikategorikan kurang baik. Hal tersebut terjadi karena berbagai kondisi yang melatarbelakangi, seperti segi pengawasan yang baik dari internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan dana BOS mulai dari perencanaan, pengawasan dan evaluasi sampai pelaporan. Hal ini dilakukan pemerintah semata-mata agar sekolah mampu melakukan pelaksanaan dana BOS dengan baik dan diharapkan dana BOS memiliki dampak yang benar terhadap peningkatan mutu.

Penggunaan dana BOS selama ini secara umum yaitu BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan

dana BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.

Persoalan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan dana BOS antara lain yaitu adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana BOS. Dan sebaliknya persoalan yang dihadapi Dinas Pendidikan menuntaskan penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS di sekolah-sekolah masih banyak ditemukan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS antara lain pengelola dana BOS tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, dan banyaknya penyelewengan dalam pelaksanaan dana BOS. Dan juga dana BOS berdampak positif dan berdampak negatif juga, dampak positif untuk sekolah pada umumnya apalagi yang ada di daerah-daerah “pinggiran” atau di pedesaan, dimana kemampuan ekonomi masyarakat/orang tua relatif terbatas, BOS jelas sangat membantu, bahwa banyak sekolah yang sebelumnya kesulitan membiayai kegiatan operasional (akibat minimnya kontribusi masyarakat) kemudian dapat membeli buku-buku teks, alat peraga, dan kebutuhan operasional lainnya dan juga membebaskan biaya bagi siswa yang kurang mampu. (Koswara, 2010).

Dampak negatif dana BOS bagi sekolah yaitu bertambahnya beban dan tanggungjawab guru dengan rumitnya pembuatan laporan pertanggungjawaban BOS tak jarang mengakibatkan guru menjadi stres, terutama bagi guru yang memiliki tanggungjawab sebagai bendahara BOS. Dan apabila sudah begitu berdampak juga kepada siswa akibatnya siswa juga terlantar karena tidak bisa mendapatkan materi pelajaran sebagaimana mestinya.

Perubahan Program BOS Tahun 2005-2010 BOS untuk jenjang pendidikan dasar adalah Anggaran Kementerian Pendidikan dan Dianggarkan pada dekon SKPD Pendidikan Provinsi. Perubahan BOS tahun 2011 BOS untuk jenjang pendidikan dasar adalah Transfer Daerah (Dana Transfer lainnya) dan Dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota. Perubahan BOS 2012-2015 BOS untuk jenjang pendidikan dasar adalah Transfer Daerah (Dana Transfer lainnya) dan Dianggarkan pada APBD Provinsi. BOS untuk jenjang pendidikan menengah adalah Anggaran Kementerian Pendidikan dan Dianggarkan pada RKA Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat SMK. Perubahan tahun 2016-2018 BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah Transfer Daerah (DAK Non Fisik) dan Dianggarkan pada APBD Provinsi. Perubahan 2019 BOS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah Transfer Daerah (DAK Non Fisik) adalah Dianggarkan pada APBD Provinsi. Ada 3 variabel BOS yaitu BOS Reguler, Bos Kinerja, BOS Afirmasi (Buku Panduan BOS, 2019).

Dari uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR PADA JAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH DATAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Fokus kajian tugas akhir ini yaitu pelaksanaan dana BOS mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, pelaporan, dan pengawasan beserta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan dana BOS. Untuk mempermudah pembahasan tugas akhir ini, saya menyusun beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar pada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam proses pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar pada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar ?

1.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Umum :

1. Memberi pengalaman kerja kepada mahasiswa untuk langsung dalam kerja lapangan pada instansi pemerintah.
2. Menambah pengetahuan mahasiswa terhadap dunia kerja berupa pengaplikasian ilmu terhadap kegiatan yang dilakukan.
3. Memperkenalkan mahasiswa yang sedang menjalani magang pada dunia kerja sehingga memiliki wawasan dan memotivasi diri untuk masa depan.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi jurusan keuangan negara dan daerah Program Diploma III, Fakultas ekonomi Universitas Andalas.

B. Tujuan Khusus :

1. Mengkaji pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar pada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.
2. Menganalisa hambatan dan upaya dalam proses pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar pada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang di peroleh dari kegiatan magang ini yaitu :

1. Bagi penulis
 - a. Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan dana BOS, serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
 - b. Agar dapat mengetahui pengertian dan landasan-landasan umum program dana BOS.
 - c. Agar dapat mengetahui penyaluran dana BOS yang terjadi.
 - d. Agar dapat mempelajari kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan khususnya mengenai dana BOS.

2. Bagi Pemerintah :

Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan pelaksanaan dana BOS.

3. Bagi Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar :

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan dana BOS.

4. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah pelaksanaan dana BOS sudah wajar atau tidak.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang di ajukan oleh penulis. Dalam pelaksanaan magang ini

penulis memilih tempat magang yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, kegiatan magang ini akan dilakukan pada tanggal 4 Februari sampai dengan 29 Maret 2019 selama 40 hari kerja yaitu hari senin sampai dengan jum'at.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang yang berhubungan dengan yang meliputi gambaran pelaksanaan dana BOS.

BAB III : Gambaran Umum

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum instansi.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan hasil studi selama magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar yang menyangkut pelaksanaan dana BOS.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat serta saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar.

